UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Evaluasi Tata Kelola Pengembangan Kawasan Mangrove sebagai Ekowisata: Studi Kasus di Tidore Kepulauan Kecamatan Oba Utara
Andrie Amarullah Subandrio, Atrida Hadianti, S.T., M.Sc., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Evaluasi Tata Kelola Pengembangan Kawasan Mangrove sebagai Ekowisata: Studi Kasus di Tidore Kepulauan Kecamatan Oba Utara

INTISARI

Kawasan mangrove di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, memiliki potensi ekowisata yang besar, namun menghadapi tekanan kerusakan ekologis serta lemahnya tata kelola kelembagaan, ditandai oleh ketiadaan status legal kawasan wisata sejak tahun 2021, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang tidak berjalan aktif, serta belum jelasnya batas zona Area Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Lindung (HL). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran stakeholder, menilai persepsi masyarakat, dan merumuskan strategi penguatan tata kelola kawasan mangrove Oba Utara sebagai ekowisata yang partisipatif dan berkelanjutan.

Penelitian menggunakan pendekatan campuran (mixed-methods), yaitu pendekatan kualitatif berbasis kerangka pentahelix untuk mengidentifikasi peran dan koordinasi antar-stakeholder, serta pendekatan kuantitatif berupa statistik deskriptif terhadap persepsi 92 responden masyarakat dan Analytic Hierarchy Process (AHP) melalui Expert Choice 11 terhadap preferensi 23 stakeholder kunci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan melibatkan lima unsur pentahelix, dengan pemerintah menempati posisi paling strategis, sementara kontribusi masyarakat masih terbatas pada tahap pelaksanaan dan belum optimal pada tahap perencanaan. Persepsi masyarakat secara umum positif terhadap tata kelola, dengan penilaian tertinggi pada kecukupan infrastruktur, sementara hasil AHP stakeholder kunci menempatkan pelestarian habitat dan kesadaran perilaku pengunjung sebagai prioritas tertinggi, dengan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, peran pemerintah sebagai fasilitator, dan keterjangkauan harga tiket sebagai titik temu kedua kelompok responden. Penelitian ini merekomendasikan percepatan legalitas kawasan, revitalisasi Pokdarwis, serta integrasi hasil penelitian ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai dasar penguatan tata kelola jangka panjang.

Kata kunci: *Tata kelola, ekowisata mangrove, pentahelix, Analytic Hierarchy Process (AHP), Tidore Kepulauan*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Evaluasi Tata Kelola Pengembangan Kawasan Mangrove sebagai Ekowisata: Studi Kasus di Tidore Kepulauan Kecamatan Oba Utara
Andrie Amarullah Subandrio, Atrida Hadianti, S.T., M.Sc., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Governance Evaluation of Mangrove Area Development as an Ecotourism Destination: A Case Study of North Oba District, Tidore Islands City

ABSTRACT

Mangrove areas in North Oba Sub-district, Tidore Islands City, hold significant ecotourism potential but face ecological degradation and weak institutional governance, marked by the absence of a legal tourism status since 2021, an inactive Tourism Awareness Group (Pokdarwis), and unclear boundaries between Other Land Use Areas (APL) and Protected Forest (HL) zones. This study aims to identify stakeholder roles, assess community perceptions, and formulate a governance-strengthening strategy for the Oba Utara mangrove area as a participatory and sustainable ecotourism destination.

A mixed-methods approach was employed, combining a qualitative approach based on the pentahelix framework to identify stakeholder roles and coordination with a quantitative approach using descriptive statistics on the perceptions of 92 community respondents and the Analytic Hierarchy Process (AHP) via Expert Choice 11 to capture the priorities of 23 key stakeholders.

The findings show that area management involves five pentahelix elements, with the government holding the most strategic position, while community contribution remains largely limited to the implementation stage and has not been optimal at the planning stage. Community perception of governance is generally positive, with the highest ratings given to infrastructure adequacy, whereas the AHP results from key stakeholders place habitat conservation and visitor behavioral awareness as the top priorities, with community involvement in planning, the government's role as facilitator, and ticket price affordability identified as common ground between the two groups. The study recommends accelerating the area's legal status, revitalizing Pokdarwis, and integrating the research findings into the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) and the Regional Spatial Plan (RTRW)/Coastal and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) as a basis for long-term governance strengthening.

Keywords: *Governance, mangrove ecotourism, pentahelix, Analytic Hierarchy Process (AHP), Tidore Islands*